



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

Pelaihari, 29 Juni 2020

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Up. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Di -

Tempat.

SURAT PENGANTAR
Nomor : 130/251 /DPMPTSP-2020

No.	Uraian	Keterangan
1.	Penyampaian Format Lampiran Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir.	Disampaikan dengan hormat untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 196501161992031008

✓ 2020
7
Ttdku

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : TANAH LAUT
URUSAN YANG DILAKUKAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja		KETERANGAN
							(1)	(2)	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGRARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat daerah, sebanyak 1 program	100%	Rasionalisasi	-
			2	Kebijakan Standard Operating Procedure (SOP)	Kebersamaan dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Cq Kementerian/LPNK	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2019	Ada 1 (satu) SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis ; Fotokopi judul SOP, halaman yang ada TTD Grafik SOPnya Apabila lebih dari 5 SOP, dibuat daftar SOP berupa tabel	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	100%	Normalisasi	-
			4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- jabatan yang ada sebanyak 16 - jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	DUK dan SOTK	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Tidak ada	tidak ada	Daftar pegawai jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	-

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
							(1)	(2)
4 PENGELLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5.099	0,0043%	Daftar PNS / DUK	
	7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan			Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada $\times 100\%$	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjelajangan, sebanyak 12 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang	75,00%	Daftar PNS yang sudah mengikuti Diklat PIM dan Daftar Pejabat Struktural	
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada $\times 100\%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang	100%	Daftar pejabat struktural beserta pangkat dan golongannya	
	9 Keberadaan dokumen pembangunan di Perangkat Daerah			Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA - SKPD	3. Jenis dokumen	Cover Renstra 2018-2023 dan Hal yg ada TTD; Cover Renja 2019 dan halaman yang ada TTD; Cover RKA 2019 dan RKA 2.2	
	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD $\times 100\%$	- Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9	100%		
	11 Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah			Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah $\times 100\%$	- Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 11 program	100%	Cover Renja 2019 , halaman yang ada TTD kepala SKPD, halaman yang ada program SKPD; Matrik sinkronisasi (sesuai contoh); Cover RKA 2019 dan RKA 2.2	
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12 Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah			Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah $\times 100\%$	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA perangkat Daerah, sebanyak 11 - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 11 program	100%	Matrik sinkronisasi(sesuai contoh); Cover RKA 2019 dan RKA 2.2; Cover DPA 2019 dan DPA2.2	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
							(1)	(2)
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.947.077.111,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. Rp. 3.003.378.598.313,12	0,0013 %	LRA Perangkat Daerah Tahun 2019	
Besaran belanja modal	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	14	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja modal Perangkat Daerah Sebesar Rp. 208.080.000,- - Total belanja Perangkat daerah sebesar Rp. 3.947.077.111,-	0,0527%	LRA Perangkat Daerah Tahun 2019	
Besaran belanja pemeliharaan	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 129.233.883,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.854.444.539,-	0,0697%	Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2019	
Laporan keuangan Perangkat Daerah	total belanja Perangkat Daerah	16	total belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 129.233.883,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.947.077.111,-	0,0327 %	Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2019	
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keberadaan Laporan Keuangan perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	17	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	ada sebanyak 3 jenis	Neraca Tahun 2019; LRA Tahun 2019; Cover Calk dan halaman yang ada TTD Tahun 2019	
Manajemen asset Perangkat Daerah	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	18	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah KIB B. 2019	Laporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten anah Laut 2018 dan KIB B. 2019	Ada	Cover Laporan dan Halaman yang ada TTD Dokumen Sensus BMD Tahun 2018 dan KIB 2019	
Penggunaan asset Perangkat Daerah	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 0 (sudah dihapuskan) - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.422.950.904,6	0,0313%	1. SK Penghapusan (berupa rupiah/harga) 2. KIB Gabungan halaman pertama dan terakhir/ Neraca		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja	KETERANGAN
					(4)	(5)		
1) PEMERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentu fasilitas /prasarana pertisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Madia	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. SMS gateway 5. Jinggle 6. Instagram 7. Facebook	Jumlah sebanyak 7 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, Sebutkan survey kepuasan tentang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Ada	Cover IKM beserta halaman yang ada nilai IKM SKPD dan halaman yang ada TTD Kepala SKPD	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN :

LAMPIRAN : IKK III.3 LAMPIRAN IKK UNTUK KABUPATEN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	984.830.600.000 - 901.033.000.015 ----- 901.033.000.015	0,0930% ----- x 100 %	Daftar realisasi PMDN tahun 2018 dan 2019

MENGETAHUI & MENGESETAHU:
Salinan Fotocopy ini sesuai dengan asli
Kasubbag Umum & Kegawaiannya
Dinas PM & KSP



LAMPIRAN: III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN:TANAH LAUT

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak 80 ijin	80 ijin	Daftar ijin investasi dalam negeri beserta nama perusahaan dan nilai investasinya yang sudah diterbitkan atau deregister ijinya (PMDDN >= 200Juta)



MENGETAHUI & MENGESETHKAN:
Salinan Fotocopy ini sesuai dengan asli
Kasubbag Umum & Kepegawaian
Dinas Pn & PTSP

Hj. BARMIVATI, S.Sos
NIP. 19640313 199603 2 017